



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya -- Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Seri D Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 27);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 161);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

14. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
21. Dampak (*inpact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
23. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2023 dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD pada Tahun 2024.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2024 dan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2024.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
Mengemukakan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
- b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023.

- c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, tujuan, dan sasaran serta program dan kegiatan Perangkat Daerah
- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.
- f. BAB V : PENUTUP.

BAB V

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang meliputi:

a. Lampiran I:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
20. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
21. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
22. Dinas Pendidikan.

b. Lampiran II:

1. Kecamatan Tuban;
2. Kecamatan Merakurak;
3. Kecamatan Semanding;
4. Kecamatan Palang;
5. Kecamatan Jenu;
6. Kecamatan Bancar;
7. Kecamatan Jatirogo;
8. Kecamatan Bangilan;
9. Kecamatan Grabagan;
10. Kecamatan Senori;
11. Kecamatan Kenduruan;
12. Kecamatan Montong;
13. Kecamatan Kerek;
14. Kecamatan Tambakboyo;
15. Kecamatan Singgahan;
16. Kecamatan Parengan;
17. Kecamatan Soko;
18. Kecamatan Rengel;
19. Kecamatan Plumpang; dan
20. Kecamatan Widang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 10 Agustus 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,
BUDI WYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI E NOMOR 22

14. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Rencana kerja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan rencana kerja bersinergi dengan penyusunan RKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkuman dari Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2024;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SK Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Untuk menentukan perencanaan pembangunan Tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2023. Adapun hasil pencapaian Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian Tahun 2023 akan diurutkan sesuai program.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2024 merupakan Tahun Keempat pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode 2026 dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama 5 tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.50 Poin	80.1 Poin	80.50 Poin	80.1 Poin	99,5%	75	75	93%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	12 Dokumen	25 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	9	9	75%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	14	9	14	156%	25	53	1060%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	14	9	14	156%	25	53	1060%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9	9	180%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	30	30	30	100%	15	75	227%
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	9	9	9	100%	150	168	1400%
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	9	9	9	100%	12	30	1000%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 Orang	33	80	33	41%	80	146	183%
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84 Paket	10	15	10	67%	240	260	310%
2.16.01.2.05.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10	15	10	67%	30	50	500%
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	10	15	10	67%	30	50	500%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100%	1	1	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10	5	10	200%	6	26	433%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10	5	10	200%	3	23	767%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	10	5	10	200%	36	56	156%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10	5	10	200%	2	22	1100%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36	36	36	100%	250	322	894%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 4 Jasa					4	4	100%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6	7	6	86%	12	24	200%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6	7	6	86%	12	24	200%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6	7	6	86%	12	24	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6	7	6	86%	12	24	200%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	50 Unit	50 Unit	50 Unit	46 Unit	92%	50	50	100%
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	5	5	5	100%	18	28	2800%
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	5	5	5	100%	20	30	111%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5	5	5	100%	1	11	220%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	5	5	5	100%	56	66	118%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	85%					75%	1	
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi	10%	10%	10%	10%	100%	10%	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	50%	50	100	50	50%	3	103	206%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8000 Dokumen	24000	24000	24000	100%	7 Dokumen	48007	600%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	1	1	1	100%	8.000 Dokumen	8002	160040%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Press Rilis Jumlah Press Rilis	90 Layanan 50 Kali	225	270	225	83%	480 Layanan 270 kali	930	664%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dokumen	5	4	5	125%	4 Dokumen	14	350%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%					42	42	42%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan Intra pemerintah atau akses internet yang diamankan yang di sediakan oleh Dinas Kominfo	100%					100%	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	42 Unit	60	53	60	113%	42%	120	287%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	35%					25%		
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Dokumen	6	4	6	150%	4 Dokumen	16	400%
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat data Pemerintahan daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1	1	1	100%	10 Unit	12	1200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	6	4	6	150%	22 Perangkat Daerah	34	155%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	4	4	4	100%	4 Unit	12	300%
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	6	4	6	150%	1 Dokumen	13	1300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	311	80	311	389%	100%	623	62300%
	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENVELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50%					25%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	25%					15%		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	375 Dokumen	75	175	75	43%	450 Dokumen	600	160%
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen					60 persen		
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	3 Orang					3 Kali		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1	1	1	100%	1 Aplikasi	3	300%
2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	55%					50%		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	55%					0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah	75	95	75	79%	2 Sistem	152	203%

Tabel 2.1
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perencanaan
Daerah Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Meningkatkan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah Kepada Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Informasi	77.01 poin	87.53 poin	82 poin
	Cakupan Layanan Jaringan TIK	100 %	100 %	100%
	Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	50 %	75 %	100%

Dari ketiga indikator sasaran diatas maka pencapaian Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target sasaran akhir Renstra masih perlu kerja keras sesuai target pencapaian tahunnya untuk mencapai target akhir tersebut. Untuk mencapai target pada masa akhir periode Renstra Tahun 2022 harus dilakukan dengan berbagai upaya sesuai dengan tahapan target tiap tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut tentu saja diimbangi dengan program kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- 2.2.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2.2.2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2.2.3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2.2.4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2.2.5. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- 2.2.6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 2.2.7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- 2.2.8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- 2.2.9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban meliputi :

- a. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan sistem informasi dan database dalam rangka mengimplementasikan *e-Government* dan layanan publik berbasis TIK yang diintegrasikan dengan aplikasi pelayanan publik berbasis website.

- b. PENERAPAN TATA KELOLA TIK dalam hal ini Pemeringkatan e-Gov merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:
 - 1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.
 - 2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
 - 3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.
- c. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING merupakan pelayanan teknis kepada OPD Kabupaten Tuban dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;
- d. SATU DATA adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
- e. KEAMANAN INFORMASI untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Kabupaten Tuban, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan;
- f. TELEKOMUNIKASI merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, perizinan bidang telekomunikasi;

- g. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.
- h. TAPROSE TEMANKU (Tuban *Public Report Services* – Tempat Masyarakat Mengadu) merupakan aplikasi baru yang dirancang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban dalam rangka memberikan layanan informasi publik dan mempermudah akses komunikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile android.
- i. SEPASI (Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal) merupakan Aplikasi untuk mengelola arsip surat perkantoran secara elektronik melalui aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile android.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	
1.	Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	-	-	50%	55%	65%	70%	75%	75%		55%	65%	
3.	Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	25%	50%	75%	100%	100%	26,19%	7%	50%	75%	

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
4.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Informasi	-	-	77,01	80,01	85,01	89,01	90,01	87,53	80,01	85,01	

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi
Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.
2. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri.
3. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
4. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD
5. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

Pemecahan masalah yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah:

1. Meningkatkan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di kabupaten Tuban;
2. Meningkatkan penerbitan media informasi;
3. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi publik;
4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang;
5. Mengelola situs web OPD secara terpusat dan aplikasi layanan informasi publik;

6. Menyelenggarakan reportase dan relay pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dan acara khusus serta acara dialog interaktif dengan tema pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah dengan berpedoman pada perencanaan ditingkat atasnya.

Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024, tema pembangunan masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 serta nantinya akan diselaraskan untuk mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban 2021-2026 yang sedang dalam proses penyusunan. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2024 dan Tema Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2024.

Untuk mendukung Prioritas Pembangunan Tahun 2024 tersebut, maka tersusunlah Arah Kebijakan sebagai pendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026, yang selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing urusan yang ditangani Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban beserta hasil analisa kebutuhan anggarannya untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tuban

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai AKIP Perangkat Daerah	81 Poin	7.901.661.042	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai AKIP Perangkat Daerah	81 Poin	7.901.661.042	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	12 Dokumen	67,351,900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	12 Dokumen	67,351,900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	36,384,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	36,384,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	30,967,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	30,967,500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	5 Dokumen	5.642.166.908	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	5 Dokumen	5.642.166.908	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	5,574,218,908	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	5,574,218,908	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	51,600,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	51,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	16,348,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	16,348,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 Orang	38.182.905	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 Orang	38.182.905	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 Paket	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10 Orang	38,182,905	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10 Orang	38,182,905	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pelatihan					Pelatihan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum	5 Layanan	237.693.410	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum	5 Layanan	237.693.410	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10,253,900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10,253,900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35,250,830	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35,250,830	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	43,611,480	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	43,611,480	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28,750,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28,750,000	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	119,827,200	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	119,827,200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban,	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	1 Unit	500,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban,	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	1 Unit	500,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sidorejo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sidorejo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	1.122.824.069	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	1.122.824.069	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22,999,360	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22,999,360	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	265,535,049	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	265,535,049	

Rancangan Awal RKPD												Catatan Penting
No	Hasil Analisis Kebutuhan					Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						Program dan Kegiatan	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24,950,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24,950,000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809,339,660	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809,339,660		
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD	50 Unit	293.441.850	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD	50 Unit	293.441.850		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	88,436,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	88,436,100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	107,328,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	107,328,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	14,960,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	14,960,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	82,717,250	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	82,717,250	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	85 %	1.374.478.700	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	85 %	1.374.478.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi	85 %				Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi	85 %		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten / Kota		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	50 %	1.374.478.700	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten / Kota		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	50 %	1.374.478.700	

No	Rancangan Awal FKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8000 Dokumen	450,704,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8000 Dokumen	450,704,000	
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	222,591,000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	222,591,000	
	Layanan Hubungan Media	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Press Rilis	90 Layanan 50 Kali	1,358,760,000	Layanan Hubungan Media	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Press Rilis	90 Layanan 50 Kali	1,358,760,000	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Tuban, Tuban, Tuban,	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan	4 Dokumen	266,198,400	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Tuban, Tuban, Tuban,	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan	4 Dokumen	266,198,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sidorejo	Pemangku Kepentingan				Sidorejo	Pemangku Kepentingan			
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	3.592.903.304	Program Aplikasi Informatika		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	3.592.903.304	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan Intra pemerintah atau akses internet yang diamankan	100%	2.562.221.096	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan Intra pemerintah atau akses internet yang diamankan	100%	2.562.221.096	

No	Rancangan Awal FKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten / Kota		yang di sediakan oleh Dinas Kominfo			Kabupaten / Kota		yang di sediakan oleh Dinas Kominfo			
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	42 Unit	5,124,442,192	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	42 Unit	5,124,442,192	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	45 %	1.030.682.208	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	45 %	1.030.682.208	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	220,312,800	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	220,312,800	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	32,136,458	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	32,136,458	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi	22	158,933,590	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi	22	158,933,590	

Rancangan Awal RKPD											
No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Elektronik					Elektronik			
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	425,292,760	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	425,292,760	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	94,006,600	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	94,006,600	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	Kab. Tuban, Tuban,	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan	1 Dokumen	100,000,000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Kab. Tuban, Tuban,	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan	1	100,000,000	

No	Rancangan Awal FKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Sidorejo	dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Sidorejo	Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50 %	396.657.150	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50 %	396.657.150	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di		Persentase OPD yang	25%	396.657.150	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di		Persentase OPD yang menggunakan	25%	396.657.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lingkup daerah Kabupaten/Kota		menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			Lingkup daerah Kabupaten/Kota		data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	375 Dokumen	162,981,950	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	375 Dokumen	162,981,950	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	125,109,800	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	125,109,800	

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	3 Orang	62,326,580	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	3 Orang	62,326,580					
	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	46,238,820	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	46,238,820					
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	55 %	186.405.050	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	55 %	186.405.050					
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem	55 %	186.405.050	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem	55 %	186.405.050					

No	Rancangan Awal FKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			Daerah Kabupaten/Kota		manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	2	372,810,100	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan	2	372,810,100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Informasi					Keamanan Informasi			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Musrenbang yang telah dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Tuban, tidak didapati usulan dari masyarakat yang mengarah pada Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban. Dengan demikian hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Prsandian Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah nihil.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tuban

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban menurut dokumen RPJPD 2005-2025 adalah pemantapan pembangunan secara keseluruhan diberbagai bidang yang menekankan pada pengembangan sektor pertanian dan industri yang berdaya saing yang didukung oleh sumber daya lokal, SDM yang berkualitas, optimalisasi kemitraan dan investasi, penguatan akses pasar hasil produksi agribisnis dan penguatan akses informasi untuk mendukung agribisnis. Sedangkan menurut RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 arah kebijakan yang mengarah pada perekonomian adalah optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan, diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan, penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan, memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif, membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja, membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata dan membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi/penghubung antar wilayah. Dari arah kebijakan diatas nantinya diharapkan pembangunan di Kabupaten Tuban secara sinergis bersama-sama saling mendukung antar bidang sehingga secara komulatif mampu meningkatkan perekonomian.

Dengan memperhatikan keselarasan tema pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, secara lebih spesifik arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban ditetapkan untuk diarahkan pada:

1. Arah kebijakan daerah dalam memaksimalkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah:
 - a. Menyusun regulasi disertai intensifikasi penindakan pelanggarannya.
 - b. Memberikan insentif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

- c. Menjamin perlindungan keamanan terhadap kebebasan umat beragama, sosial dan kemasyarakatan.
- d. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja, penelitian dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan.
- e. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjang prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan partisipasi stake holders.
- f. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang berkualitas agar terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- g. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur.
- h. Menyelenggarakan penataan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan.
- i. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
- j. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana dan penerapan Bina Keluarga Balita.
- k. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat/bergizi pencegahan dan pengendalian penyakit/masalah kesehatan lainnya serta perilaku hidup bersih dan sehat.
- l. Melaksanakan program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor.
- m. Mengembangkan kurikulum, sistem manajemen pengelolaan dan pembiayaan pendidikan, membangun kompetensi dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, meningkatkan partisipasi masyarakat buta huruf dalam pendidikan non formal.
- n. Penguatan karakter dan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan karakter, agama dan kewarganegaraan.

- o. Mengembangkan operasionalisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, serta membangun sistem yang dapat menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - p. Meningkatkan Budaya Literasi Pada Masyarakat.
 - q. Membangun sarana prasarana, pembinaan, kemitraan, kelembagaan olahraga dan kepemudaan.
 - r. Meminimalisir potensi dan kerawanan konflik masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terutama yang menyangkut isu SARA.
 - s. Peningkatan partisipasi Pemilih.
 - t. Pencegahan dan pemberantasan produksi, distribusi serta konsumsi MIRAS/Narkoba.
2. Arah kebijakan daerah dalam memaksimalkan pertumbuhan berkualitas adalah:
- a. Optimalisasi produksi hasil pertanian, Perikanan dan Peternakan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan.
 - b. Diversifikasi produk dan olahan produksi hasil perikanan, pertanian dan peternakan untuk memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan kepada masyarakat.
 - c. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan;
 - d. Memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif.
 - e. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja
 - f. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata.
 - g. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi/penghubung antar wilayah utamanya antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 - h. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
 - i. Pembangunan/pengembangan sarana/prasarana air minum dan sanitasi layak.

- j. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
- k. Pembangunan infrastruktur air limbah domestik dan infrastruktur pengelolaan persampahan.
- l. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta rumah layak huni.
- m. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang, pengolahan lingkungan hidup dan manajemen kebencanaan.
- n. Penambahan luas Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik kreatif.
- o. Penerapan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- p. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan sentra-sentra industri potensial.
- q. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan melindungi konsumen guna meningkatkan daya saing produk Daerah.
- r. Pendataan kelistrikan Daerah.
- s. Sosialisasi pertambangan dan energy galian mineral non logam dan bantuan.

Penerapan kebijakan tersebut dalam konsep yang lebih implementatif dijabarkan dalam program prioritas Tahun 2023 untuk menunjang peningkatan struktur ekonomi Daerah yang kokoh dan berlandaskan keunggulan lokal. Dari gambaran kondisi makro Kabupaten Tuban saat ini maka untuk mempercepat penanganan isu strategis diperlukan sebuah tema pembangunan yang fokus pada pencapaian sasaran isu strategis tersebut sehingga nantinya prioritas, arah kebijakan serta strategi pembangunan melalui program dan kegiatan dapat mengarah pada pencapaian sasaran yang tepat, sehingga nantinya prioritas, arah kebijakan serta strategi pembangunan melalui program dan kegiatan dapat mengarah pada pencapaian sasaran yang tepat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban merupakan salah satu bagian dalam rangka mencapai sasaran

startegis Kepala Daerah dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Renstra OPD. Sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai perangkat daerah turut bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran startegis Kepala Daerah.

Adapun tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 adalah Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Tujuan ini menggambarkan bagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Tuban. Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 diatas maka sasaran strategis yang hendak dicapai setiap tahun adalah Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 adalah Terwujudnya layanan dan pemanfaatan infrastruktur TIK yang baik sesuai dengan rumusan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Birokrasi yang Kapabel		Indeks SPBE	Penilaian Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik	Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK	Jumlah OPD yang terlayani TIK dibagi seluruh OPD dikali 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	Sistem Informasi yang terintegrasi dibagi seluruh sistem informasi dikali 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah/seluruh OPD dikali 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Profesional ASN, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Konsultasi dan Pengaduan	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Profesional ASN, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Konsultasi dan Pengaduan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya pelayanan informasi publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026, Rancangan awal RKPD Tahun 2024 maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2024. Secara keseluruhan Jumlah program pada Rencana Awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2024 ada 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Program sebagai berikut :

1. Sasaran Program: Penunjang
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 7.901.661.042,-
2. Sasaran Program: Meningkatnya OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo dan Meningkatnya Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi.
 - Program Aplikasi Informatika sebesar Rp 3.592.903.304,-
3. Sasaran Program: Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik
 - Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp 1.374.478.700,-
4. Sasaran Program,: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar Rp 396.657.150,-
5. Sasaran program: Keamanan Jaringan TIK, Sistem Informasi dan Pusat Data
 - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp 186.405.050,-

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01	Program Penunjang Urudan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah		81 Poin	7.901.661.042			80.50 Poin	7.901.661.042
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun		12 Dokumen	67,351,900			12 Dokumen	67,351,900
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	5 Dokumen	36,384,400	Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	36,384,400
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	5 Dokumen	30,967,500	Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	30,967,500

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun		5 Dokumen	5.642.166.908			5 Dokumen	5.642.166.908
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Sidorejo	33 Orang/bulan	5.574.218.908	Dana Alokasi Umum		33 Orang/bulan	5.574.218.908
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Dokumen	51.600.000	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	51.600.000
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Sidorejo	3 Dokumen	16,348,000	Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	16,348,000

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai		80 Orang	38.182.905			80 Orang	38.182.905
2.16.01.2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tuban, Sidorejo	0 Paket	0	Pendapa tan Asli Daerah		0 Paket	0
2.16.01.2.05.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tuban, Sidorejo	29 Orang	38.182.905	Dana Alokasi Umum		29 Orang	38.182.905
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Tuban, Sidorejo	0 Orang	0	Dana Alokasi Umum		0 Orang	0

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Kab. Tuban, Sidorejo	5 Layanan	237.693.410			5 Layanan	237.693.410
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	6 Paket	10.253.900	Dana Alokasi Umum		6 Paket	10.253.900
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	3 Paket	35.250.830	Dana Alokasi Umum		3 Paket	35.250.830
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	36 Paket	43.611.480	Dana Alokasi Umum		36 Paket	43.611.480

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	2 Paket	28.750.000	APBD- Kab		2 Paket	28.750.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Sidorejo	50 Laporan	119.827.200	Dana Alokasi Umum		50 Laporan	119.827.200
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Unit	500.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Unit	500.000.000
2.16.01.2.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Unit	500.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Unit	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Tuban, Sidorejo	4 Jasa	1,127,670,699			4 Jasa	1,127,670,699
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Laporan	22.999.360,	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	22.999.360,
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Laporan	265.535.049	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	265.535.049
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Laporan	24.950.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	24.950.000

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Laporan	809.339.660	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	809.339.660
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	Kab. Tuban, Sidorejo	50 Unit	293.441.850			50 Unit	293.441.850
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Unit	88.436.100	Dana Alokasi Umum	-	1 Unit	88.436.100
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Kab. Tuban, Sidorejo	27 Unit	107.328.500	Dana Alokasi Umum		27 Unit	107.328.500

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Tuban, Sidorejo	5 Unit	14.960.000	Dana Alokasi Umum		5 Unit	14.960.000
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Sidorejo	56 Unit	82.717.250	Dana Alokasi Umum		56 Unit	82.717.250
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	Kab. Tuban, Sidorejo	85 %	1.374.478.700			85 %	1.374.478.700

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pemerintah daerah						85 %	
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi		85 %					
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Tuban, Sidorejo	50 %	1.374.478.700			50 %	1.374.478.700
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tuban, Sidorejo	24.000 Dokumen	450.704.000	Dana Alokasi Umum		24.000 Dokumen	450.704.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi	Kab. Tuban,	5 Dokumen	111.295.500	Dana Alokasi		5 Dokumen	111.295.500

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Publik	Sidorejo			Umum			
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Press Rilis	Kab. Tuban, Sidorejo	90 Layanan 50 Kali	679.380.000	Dana Alokasi Umum		90 Layanan 50 Kali	679.380.000
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Tuban, Sidorejo	4 Dokumen	133.099.200	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	133.099.200
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kab. Tuban, Sidorejo	100%	3.592.903.304			100%	3.592.903.304
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan Intra pemerintah	Kab. Tuban, Sidorejo	100%	2.562.221.096			100%	2.562.221.096

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	atau akses internet yang diamankan yang di sediakan oleh Dinas Kominfo							
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	42 Unit	2.562.221.096	Dana Alokasi Umum		42 Unit	2.562.221.096
2.16.03.2.02	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Kab. Tuban, Sidorejo	45 %	1.030.682.208			45 %	1.030.682.208
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan	Kab. Tuban, Sidorejo	4 Dokumen	220.312.800	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	220.312.800

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Berbasis Elektronik							
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Unit	32.136.458	Dana Alokasi Umum		1 Unit	32.136.458
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Tuban, Sidorejo	22 Perangkat Daerah	158.933.590	Dana Alokasi Umum		22 Perangkat Daerah	158.933.590
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Tuban, Sidorejo	4 Unit	425.292.760	Dana Alokasi Umum		4 Unit	425.292.760
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang	Kab. Tuban,	1 Dokumen	94.006.600	Dana Alokasi		1 Dokumen	94.006.600

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Sidorejo			Umum			
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	50 %	396.657.150			50 %	396.657.150

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	25 %	396.657.150			25 %	396.657.150
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Sidorejo	375 Dokumen	162.981.950	Dana Alokasi Umum		375 Dokumen	162.981.950
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Tuban, Sidorejo	4 Dokumen	125.109.800	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	125.109.800

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kab. Tuban, Sidorejo	3 Orang	62.326.580	Dana Alokasi Umum		3 Orang	62.326.580
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Unit	46.238.820	Dana Alokasi Umum		1 Unit	46.238.820
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Kab. Tuban, Sidorejo	55 %	186.405.050			55 %	186.405.050
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan	Kab. Tuban, Sidorejo	55 %	186.405.050			55 %	186.405.050

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah							
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Tuban, Sidorejo	2 Perangkat Daerah	186.405.050	Dana Alokasi Umum		2 Perangkat Daerah	186.405.050

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban

Tahun 2024

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81 Poin	7.901.661.042
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	12 Dokumen	67,351,900
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	36,384,400
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,967,500
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	5 Dokumen	5.642.166.908

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			(4)	(5)
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	5.574.218.908
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	51.600.000
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	16,348,000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 Orang	38.182.905
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 Paket	0
2.16.01.2.05.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	38.182.905
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	5 Layanan	237.693.410
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.253.900
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.250.830
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	43.611.480
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.750.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	119.827.200

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)		500.000.000
2.16.01.2.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		500.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	1,127,670,699
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.999.360,
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	265.535.049
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.950.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809.339.660
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	50 Unit	293.441.850
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	88.436.100
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	107.328.500
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	14.960.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	82.717.250
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	85 %	1.374.478.700
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi	85 %	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	50 %	1.374.478.700

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	24.000 Dokumen	450.704.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	111.295.500
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Press Rilis	90 Layanan 50 Kali	679.380.000
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dokumen	133.099.200
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	3.592.903.304

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan Intra pemerintah atau akses internet yang diamankan yang di sediakan oleh Dinas Kominfo	100%	2.562.221.096
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	42 Unit	2.562.221.096
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	45 %	1.030.682.208
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Dokumen	220.312.800
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	32.136.458

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			(4)	(5)
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	158.933.590
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	425.292.760
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	94.006.600
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50 %	396.657.150
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	25 %	396.657.150
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	375 Dokumen	162.981.950
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	125.109.800
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	22 OPD	62.326.580

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	46.238.820
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	55 %	136.405.050
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	55 %	136.405.050
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah	136.405.050

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2024 ini merupakan penjabaran tahun ketiga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dalam mendukung tercapainya target RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Dengan demikian Rencana Kerja tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman dan sarana untuk mewujudkan sasaran dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tuban.

Rencana Kerja ini akan dapat berjalan efektif dan efisien apabila didukung oleh semua pihak, baik internal yakni seluruh komponen dalam Perangkat Daerah itu sendiri dalam bentuk kerjasama yang solid, maupun pihak eksternal. Ketersediaan anggaran sangat menentukan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah maka seluruh aparatur di Lingkungan Perangkat Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Kerja tersebut dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan;

terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perangkat Daerah. Untuk itu setiap Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Rencana Kerja yang menjadi tanggung jawabnya setiap Tribulan kepada Kepala Dinas.

BUPATI TUBAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aditya Halindra Faridzky', with a stylized flourish at the end.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY